



Opini Audit Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020–2024

Farida¹, Rini Oktavia², Golda Belladonna Umbing³, M. Ichsan Diarsyad⁴, Sifera Patricia Maithy⁵

¹⁻⁵ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis: faridanatalia642@gmail.com

Abstract. *The present investigation intends to empirically analyze the impact of accounting View and Examination outcomes of the Examination Junta de la Republic of Indonesia (BPK) on Performance of Local Government, projected through the score of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). The individuals involved in this research covers every Regency and Municipal Authorities in Central Kalimantan Province, totaling 14 regions during the 2020–2024 observation period. The sampling method employed unbiased sampling approach with a saturated sampling (census) approach, obtaining a entire observation data of 70 samples. Data analysis was performed utilizing a multiple linear regression model supported by SPSS software. The outcomes of the traditional assumption test indicates that the regression model satisfies the normality requirement (Asymp. Sig. value of 0.200), is free from multicollinearity (VIF value of 1.009), and is free from heteroscedasticity. The outcomes of the partial hypothesis examination (t-test) prove that the Audit Opinion does not impact Local Government Execution (Sig. value 0.838 > 0.05) and the BPK Audit Conclusions also do not influence local Government Performance (Sig. value 0.566 > 0.05). Simultaneously (F-test), both independent variables do not significantly affect local government performance with the capability of the model to elucidate variance (Adjusted R Square) at -0.024. The findings of this research confirm the phenomenon of decoupling or responsibility paradox, where the achievement of administrative financial opinions (WTP) and fluctuations in audit findings have not gone hand in hand with the effectiveness of real public service performance in the field.*
Keywords: Audit Opinion; BPK Audit Findings; Local Government Performance; SAKIP; Agency Theory.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji berdasarkan pengalaman dampak Audit Opinion dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Kinerja Pemerintah Daerah yang diproyeksikan melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah (SAKIP). Populasi dalam penelitian ini mencakup semua Pemkab dan Kota ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki jumlah 14 area selama rentang waktu pengamatan 2020–2024. Teknik pengumpulan sampel menerapkan metode Non-Probability sampling menggunakan pendekatan pengambilan sampel jenuh (sensus), sehingga diperoleh total data observasi sebanyak 70 sampel. Data dianalisis dengan model regresi linear ganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil ujian asumsi dasar memperlihatkan bahwa model regresi memenuhi syarat normalitas (nilai Asymp. Sig. 0,200), bebas dari multikolinearitas (nilai VIF 1,009), dan bebas dari tanda-tanda heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi secara individual (uji t) menunjukkan bahwa Opini Audit tidak mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (nilai Sig. 0,838 > 0,05) dan Pemeriksaan Audit Lembaga Finansial juga tidak memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (nilai Sig. 0,566 > 0,05). Secara bersamaan (uji F), kedua variabel independen tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja daerah dengan kemampuan model menjelaskan variasi (Adjusted R Square) mencapai -0,024. Hasil dari penelitian ini mengonfirmasi fenomena *decoupling* atau paradoks akuntabilitas, di mana capaian opini keuangan administratif (WTP) dan fluktuasi temuan belum berjalan beriringan dengan efektivitas capaian kinerja pelayanan publik nyata di lapangan.

Kata kunci: Opini Audit; Temuan Audit BPK; Kinerja Pemerintah Daerah; SAKIP; Teori Keagenan.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan wilayah merupakan instrumen kelola pemerintah sangat penting untuk mendorong pemerintah (*good administration*). Di era otonomi kawasan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pemerintah (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas ini tidak hanya diukur dari opini atas laporan keuangan yang bersifat

administratif, tetapi juga dari kinerja nyata instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Namun, terdapat fenomena kontradiktif yang berlangsung di Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), hampir seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah secara konsisten mendapatkan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, hasil opini tertinggi itu tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan kinerja yang dievaluasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (SAKIP). Skor SAKIP pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah masih didominasi oleh predikat "B", yang mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja belum sepenuhnya optimal.

Fenomena ini memicu perdebatan dalam konteks Teori Keagenan (*Agency Theory*). Audit eksternal oleh BPK seharusnya menjadi alat kontrol agar agen (pemerintah daerah) bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal atau masyarakat (Jensen & Meckling, 1976). Jika raihan opini WTP tidak mampu mendorong peningkatan skor kinerja secara signifikan, maka muncul dugaan bahwa proses audit masih cenderung bersifat kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya menyentuh substansi efektivitas kinerja pelayanan publik.

Di samping itu, permasalahan berkaitan dengan hasil audit yang masih tercatat kawal Ikhtisar Hasil Evaluasi Daerah (IHPD) menunjukkan adanya tantangan dalam penguatan sistem pengendalian internal. Penelitian terdahulu mengenai hubungan ini menampilkan hasil yang tidak stabil (*research gap*). Ditasari dan Sudrajat (2020) menemukan bahwa pendapat audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sementara penelitian lain memberikan hasil yang berbeda. Adanya ketidakkonsistenan hasil inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam pada lingkup Daerah/Kota Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020–2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (Agency Theory)

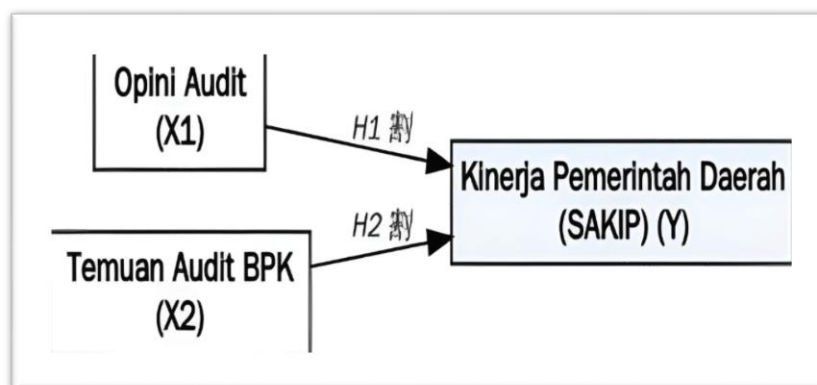
Teori ini menguraikan keterkaitan antara masyarakat sebagai pihak utama dan pemerintah sebagai perwakilan. Dalam konteks ini, audit oleh BPK berperan sebagai alat untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi, sehingga agen tetap bertindak sesuai kepentingan publik (Jensen & Meckling, 1976).

Teori Stewardship

Tidak seperti teori keagenan, teori stewardship memandang pelayan publik (pemerintah) sebagai pengelola yang berupaya melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi

kepentingan organisasi dan pelayanan masyarakat, bukan sekadar kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991).

Gambar 2.1 Struktur Konseptual penelitian



Pengembangan Teori

H1: Opini Audit memiliki dampak positif tentang Kinerja Pemerintah Daerah. Semakin baik opini, seharusnya semakin tinggi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kinerja.

H2: Hasil Audit memiliki dampak buruk pada Kinerja Pemerintah Daerah. Semakin banyak hasil temuan pemeriksaan, menunjukkan SPI yang lemah yang dapat menghambat capaian target kinerja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif menggunakan desain penelitian yang bersifat eksploratif (exploratory research) pendekatan numerik digunakan karna studi ini berorientasi pada uji hipotesis, pengukuran data numerik, dan penarikan kesimpulan statistik (Sugiyono, 2019). Desain eksplanatori diterapkan untuk menguraikan posisi variabel-variabel yang diteliti serta relasi dan dampak antara variabel independen, yaitu

Opinion de Auditoria (X1) dan Hasil Audit (X2), berhubungan dengan variabel tergantung yaitu Performa Pemerintah Daerah (Y).

Populasi & Contoh Penelitian

Penduduk dalam studi ini mencakup seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang wilayah terletak di administrasi Wilayah Kalimantan Tengah yang jumlahnya 14 daerah (13 Kabupaten dan 1 Kota). Metode pengambilan contoh yang diterapkan dalam studi ini adalah Sampling Non-probabilitas menggunakan teknik sampling Jenuh atau Sensus. Berdasarkan metode ini, setiap individu dalam populasi dianggap sebagai sampel peneliti akibat populasi yang cukup kecil dan peneliti ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang rendah Periodisasi Pengamatan telah dilakukan selama periode lima tahun yakni mulai sejak tahun

2020 hingga tahun 2024. Proses penentuan dan rincian perolehan total data observasi dalam studi ini disajikan.

Tabel 3.1 Prosedur

	Pemilihan	Keterangan
1.	Pemerintah Wilayah serta Kota Provinsi Kalimantan Tengah	14 Wilayah
2.	Periode Tahun Pengamatan Penelitian (2020–2024)	5 Tahun
3.	Total Data Observasi Awal (14 Daerah x 5 Tahun)	70 Sampel
4.	<i>Data Outlier</i> (Data ekstrem yang harus dieleminasi)	0 Sampel
5.	Total Akhir Sampel yang Layak Diolah	70 Sampel

Tipe dan Asal Data

Tipe data yang dipakai dalam studi ini adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder yang memiliki sifat kuantitatif. Data sekunder merujuk pada informasi peneliti yang didapatkan secara tidak langsung. Melainkan melalui saluran penengah atau dokumen resmi yang telah dipublikasikan oleh Instansi yang bersangkutan. Informasi yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari dua tipe lembaga otoritas resmi, yaitu:

- A. Information Opini Audit dan Total Temuan Audit didapat dari **Laporan Hasil Evaluasi (LHP) BPK RI** yang terangkum dalam Ringkasan Temuan Pemeriksaan Daerah (RTPD) Povinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024.
- B. Data Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh dari **Laporan Evaluasi Sistem Pertanggungjawaban Kinerja Lembaga Publik (SAKIP)**. Kabupaten/Kota yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Penggunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB pada tahun 2020-2024.

Definisi Operasional serta Pengukuran Variabel

Variabel dalam ini terdiri atas dua variabel indeviden dan satu variabel yang tergantung. Setiap variabel yang diukur dijelaskan sebagai berikut.

Kinerja Pemerintah Daerah (Variabel Tergantung Y)

Kinerja pemerintah daerah adalah gambar tentang tingkat realisasi dari pelaksanaan sebuah aktivitas, program, atau kebijakan untuk mencapai target, tujuan, misi dan visi organisasi. Tentu penelitian ini, kinerja diukur menggunakan **Nilai/Skor Absolut SAKIP** komponen pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB, dengan skala data rasio (0–100).

Opini Audit (Variabel Independen – X1)

Opini Audit adalah pernyataan yang bersifat profesional. Auditor tentang kelayakan keuangan. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Variabel ini diukur menggunakan skala ordinal dengan memberikan bobot skor berdasarkan tingkat kualitas opini BPK sebagai berikut:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan skor 4.

Pemberian Skor 3 untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pendapatan Tidak Khas (TW) diberikan nilai 2

Opini Tidak Memberikan Pandangan (TMP/Disclaimer) diterima skor 1.

Temuan Audit (Variabel Independen - X2)

Hasil audit adalah temuan evaluasi dari auditor BPK yang memperlihatkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan atau kekurangan dalam Sistem Kontrol Internal (SPI). Variabel ini diukur berdasarkan **jumlah total kasus temuan** (baik temuan administrasi maupun finansial) yang tercantum dalam LHP BPK mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing wilayah per tahun, dengan skala data rasio.

Metode Analisis Data

Pemrosesan dan evaluasi data dalam studi ini dilaksanakan dengan perangkat lunak statistik Analisis SPSS yang diterapkan. Tahapan analisis data yang digunakan meliputi:

Analisis Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan penggambaran atau penjelasan tentang ciri-ciri data setiap variabel, yang dianalisis berdasarkan nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata (mean) dan deviasi standar.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melaksanakan analisis regresi linier ganda, model studi perlu diuji agar memenuhi ketentuan *Bast Estimador Linear No Sesgado* (BLUE) dilakukan melalui serangkaian uji asumsi klasik, yaitu:

- A. Uji Kecendrungan Normal Menfaatkan uji *one-sample kolmogorov-Smirnov* untuk mengevaluasi apakah angka remanging dalam regresi model distribusi usual (syarat: nilai *Asimptotik sig.* > 0,05).
- B. Uji Multikolinearitas: Agar menguji apakah ada keterikatan antara variabel independen hubungan linear yang kuat, dengan melihat nilai *Tolerance* (> 0,10) dan *Variance Inflation Factor* (VIF < 10).

- C. Uji Heteroskedastisitas Untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, yang dideteksi melalui diagram scatterplot.
- D. Uji Autokorelasi: Untuk menilai apakah ada keterkaitan antara kesalahan gangguan di periode t yang mengalami kesalahan di periode sebelum ini ($t-1$).

Regresi Berganda Analisis

Model regresi linear digunakan berulang kali untuk menguji arah dan besarnya dampak variabel dependen dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel independen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

$$\text{SAKIP (Y)} = \alpha + \beta_1 \text{OPINI}(X_1) + \beta_2 \text{TEMUAN}(X_2) + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah (Skor SAKIP)

α = Nilai Tetap

β_1, β_2 = Koefisien Regresi untuk tiap variabel

X_1 = Audit Opini

X_2 = Temuan Audit

Uji Hipotesis

- A. **Uji Signifikansi Parsial (Uji t):** Digunakan untuk menguji apakah secara individu Variabel pendapat Audit dan Hasil Audit memberikan dampak signifikan terhadap Performa Pemerintah (syarat: nilai Sig. < 0,005).
- B. **Uji Signifikansi Simultan (Uji F):** Dipakai untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara kolektif memengaruhi variabel bergantung.
- C. **Koefisien Determinasi (R^2):** Dipakai untuk menilai sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan beragam variabel dependen (kinerja), yang terlihat melalui nilai R Kuadrat yang disesuaikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dipakai untuk menyajikan ilustrasi umum tentang ciri-ciri empiris dari variabel-variabel yang dianalisis mencakup jumlah sampel (N), batas bawah, batas atas, rata-rata nilai (mean), dan deviasi standar. Penelitian ini memanfaatkan seluruh 70 data observasi yang bersumber dari 14 Daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah saat periode tahun 2020–2024.

Berdasarkan data yang diolah, variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) yang diproyeksikan melalui skor SAKIP menunjukkan rata-rata capaian berada pada rentang predikat nilai "B", yang mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja yang cukup baik namun masih memerlukan optimalisasi. Pada variabel Opini Audit (X1), data menunjukkan kecenderungan terpusat pada skor tertinggi (skor 4) karena hampir seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Tengah secara konsisten berhasil mengamankan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Reublik Indonesia. Sementara itu, variabel Temuan Audit BPK (X2) menunjukkan variasi jumlah kasus temuan yang cukup dinamis antar kabupaten/kota di setiap tahun pengamatan.

Hasil Uji Hipotesis Trdisional

Sebelum melaksanakan uji regresi linear ganda dan pengujian hipotesis, model penelitian ini wajib memenuhi prasyarat statistik agar menghasilkan estimasi yang bersifat *Optimal Linear Unbiased Estimator* (OLUE). Pengujian Asumsi dasar dalam studi ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Kecocokan Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sejauh mana dalam modal regresi, variabel gangguan atau sisa memiliki sebaran yang standard (Ghozali, 2018). Model regresi yang valid membutuhkan nilai sisa yang terdistribusi normal. Uji coba statistik dalam studi ini memanfaatkan metode **Single sample Kolmogorov-Smirnov Test** yang disajikan di Tabel 4.1 Berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.75814626
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.1, nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov (Statistik Uji) adalah sebesar 0,051 dengan tingkat signifikansi (*Asympt. Sig. 2-tailed*) menunjukkan angka **0,200**. Hasil ini mengonfirmasi bahwa tingkat signifikansi yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan kriteria alpha yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 (**0,200 > 0,05**).

Dengan demikian, yang berarti bahwa **angka sisa di dalam model regresi penelitian ini terdistribusi secara standar**

Terpenuhinya asumsi distribusi normal ini juga diperkuat melalui pendekatan visual memanfaatkan grafik *Normal P-P Plot dari Residu Standar Regresi* Pada grafik tersebut, nampak titik-titik plot data disebarkan secara konsisten di sekitar garis miring dan penyebarannya mengikuti jalur garis diagonal itu. Karakteristik visual ini mempertegas bahwa model regresi telah memenuhi syarat normality secara sempurna dan terbebas dari bias sebaran data.

Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menilai apakah terdapat koreksi dalam model regresi linear yang kuat antara variabel yang mandiri. Model regresi yang efektif prasyaratnya tidaklah demikian ada hubungan yang terjalin di antara variabel bebas. Deteksi Multikolinearitas dianalisis dengan memeriksa nilai *Tolerance* dan *Faktor Inflasi (VIF)* Varian pada tabel *Coefficients*.

Hasil olah data menunjukkan bahwa variabel Opini Audit (X1) dan Temuan Audit BPK (X2) memiliki nilai *Tolerance* yang persis sama, yaitu sebesar **0,991** (di atas 0,10) dan nilai VIF mencapai 1,009 Mengingat nilai VIF untuk kedua variabel bebas tersebut terletak jauh di bawah angka batas maksimum 10 (**1,009 < 10**), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini **bebas dari masalah multikolinearitas** dan bisa digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan agar menguji apakah terdapat ketidaksamaan pada model regresi varians dari satu penganatan kepengamatan yang berikut. Uji coba ini dideteksi melalui analisis grafik *Scatterplot*. Berdasarkan grafik *Scatterplot* yang dihasilkan oleh SPSS, tanda-tanda data ters dispers secara acak, tidak teratur, dan menyebar secara merata baik diatas maupun dibawah angka nol di sumbu Y. Tidak adanya pola geometris tertentu (seperti menumpuk, bergelombang atau menyusut membuktikan bahwa model regresi tersebut **tidak mengalami gejala heteroskedastisitas**.

Hasil Pengujian Model dan Hipotesis

Koefisien Penentuan (R^2)

Analisis koefisien penentuan dipakai buat menilai sejauh mana kemampuan model untuk menjelaskan beragam variabel bergantung. Berdasarkan output tabel Ringkas Model, nilai *Adjusted R Square* yang didapatkan adalah sebesar -0,024. Nilai *R Square* yang disesuaikan bernilai minus dan mendekati nol ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel

independen (Opini Audit dan Temuan Audit) dalam menjelaskan variasi naik-turunnya nilai Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) di Kalimantan Tengah adalah sangat terbatas. Variasi nilai kinerja daerah secara mutlak diuraikan melalui faktor-faktor lain diluar karangka penelitian.

Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan ke dalam modal bersamaan (simultan) terhadap terhadap variabel yang bergantung. Berdasarkan output Tabel ANOVA memperlihatkan nilai F-statistik yang diperoleh sebesar **0,200** dengan nilai penting (Sig.) mencapai **0,819**. Karna nilai penting tersebut sangat lebih dari 0,05 (**0,819 > 0,05**), maka secara simultan regresi model ini menyatakan bahwa variabel Pendapatan Audit dan hasil Audit BPK tidak memberikan dampak yang berarti untuk Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Uji Hipotesis Sebagian (Uji t)

Uji statistik t dipakai untuk melakuakn uji signifikansi dampak dari setiap variabel independen secara individual atau parsial dalam menguraikan variabel tergantung. ringkasan hasil pengujian t dirinci pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)

Model / Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	t- hitung	Signifikansi (Sig.)	Keterangan
(Constant)	19,226	7,487	0,000	Signifikan
Opini Audit (X₁)	-0,065	-0,205	0,838	H1 Ditolak (Tidak Berpengaruh)
Temuan Audit BPK (X₂)	-0,186	-0,576	0,566	H2 Ditolak (Tidak Berpengaruh)
<i>Sumber: Data Sekunder Diolah Melalui SPSS (2026)</i>				

Berdasarkan temuan olah data Dalam Tabel 4.2,model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 19,226 - 0,065X_1 - 0,186X_2 + e$$

Interpretasi dan Pengujian hipotesis secara individual dijabarkan sebagai berikut:

Uji coba Pengaruh Opini Audit tentang Kinerja Pemerintah Lokal (H1)

Sesuai dengan hasil pengujian t yang terdapat pada Tabel 4.2, variabel Opini Audit memiliki Koefisien regresi yang sama (B) sebesar $-0,065$ dengan nilai t -hitung sebesar $-0,205$ dan nilai signifikansi sebesar $0,838$. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ ($0,838 > 0,05$), maka Hipotesis Pertama (H_1) secara resmi ditolak. Hal ini menyediakan bukti empiris bahwa secara terpisah, Opini Audit tidak dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengujian Dampak Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (H_2)

Berdasarkan hasil analisis t pada Tabel 4.2, variabel Hasil Audit BPK mempunyai koefisien regresi (B) sebesar $-0,186$ dengan nilai t - hitungan yang diperoleh $-0,576$ dan tingkat signifikansi mencapai $0,566$. Diebakkan oleh tingkat signifikansi tersebut jauh lebih besar dari harga nyata $0,05$ ($0,566 > 0,05$), maka **Hipotesis Kedua (H_2) secara resmi ditolak**. Ini merupakan membuktikan bahwa sebagian, jumlah Temuan Audit BPK tidak mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah pada Kota di Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembahasan

Analisis Dampak Audit Opini Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah

Penolakan terhadap (H_1) menegaskan secara empiris mengenai adanya fenomena paradoks akuntabilitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kacamata Teori Keagenan (*Agency Theory*), jaminan opini audit eksternal dari BPK idealnya berfungsi sebagai instrumen monitoring yang memberikan sinyal positif mengenai kualitas tata kelola agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat). Namun, hasil penelitian ini membuktikan terjadinya pemisahan (*decoupling*) di mana capaian opini tertinggi (WTP) tidak berkorelasi dengan tingginya indeks akuntabilitas kinerja manajerial (SAKIP).

Kondisi ini terjadi karena perolehan opini WTP yang diraih secara beruntun oleh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah cenderung didorong oleh motivasi kepatuhan administratif dan formalitas hukum untuk menyelaraskan laporan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Proses audit keuangan oleh BPK berfokus berdasarkan empat kriteria utama: keselarasan dengan SAP, cukupnya penyampaian (*full disclosure*), kepatuhan terhadap hukum, serta efisiensi SPI dalam pelaporan finansial. BPK tidak menilai apakah realisasi anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai target pembangunan daerah. Di sisi lain, penilaian SAKIP oleh Kemenpan-RB berfokus pada *outcome* dan substansi kinerja birokrasi di lapangan. Akibatnya, daerah yang meraih predikat WTP secara finansial belum tentu mampu menghasilkan efektivitas pelayanan publik yang tinggi. Temuan penelitian ini mendukung dan sejalan dengan temuan Ditasari dan Sudrajat (2020) yang menyatakan

bahwa pendapat audit tidak memiliki korelasi langsung dengan tingkat efektivitas capaian kinerja nyata pemerintah setempat.

Analisis Dampak Penemuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penolakan terhadap Hipotesis Kedua (H2) mengindikasikan bahwa naik-turunnya jumlah kasus temuan pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPD tidak memberikan dampak bagi pergeseran skor SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan kerangka Teori Stewardship, aparat birokrasi diposisikan sebagai pengelola (*steward*) yang memiliki tanggung jawab moral untuk meminimalkan kesalahan tata kelola demi integritas organisasi.

Tidak berpengaruhnya variabel ini memberikan petunjuk kuat bahwa karakteristik temuan audit BPK di wilayah Kalimantan Tengah sebagian besar masih didominasi oleh permasalahan administratif teknis, seperti keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban fisik, kesalahan pencatatan aset minor, atau ketidakpatuhan prosedural ringan yang tidak secara langsung mengganggu jalannya program-program strategis pelayanan masyarakat. Selain itu, tingginya komitmen entitas pemerintah daerah di Kalimantan Tengah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) membuat catatan-catatan minor tersebut dapat diselesaikan secara hukum sebelum merusak performa indeks evaluasi kinerja sektoral yang dinilai oleh Kemenpan-RB. Hal ini menegaskan bahwa koridor evaluasi temuan akuntansi dari aspek audit keuangan memiliki ruang lingkup yang terpisah dan tidak mengganggu jalannya sistem manajemen kinerja birokrasi daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan evaluasi data dan diskusi yang telah dilakukan dijelaskan pada bagian sebelum ini, kesimpulana Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebagian kecil berdampak pada Opini Audit tidak berdampak pada Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020–2024. Perolehan opini WTP secara beruntun belum mampu menjadi penggerak utama dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja birokrasi (SAKIP), melainkan lebih mencerminkan pemenuhan aspek kepatuhan administratif formal dalam pelaporan keuangan.

Secara parsial, Temuan Audit oleh BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah waktu 2020–2024. Banyak atau sedikitnya jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor tidak berdampak signifikan pada

penurunan nilai kinerja daerah karena karakteristik temuan didominasi oleh masalah administratif ringan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Secara simultan, Opini Audit dan Hasil Audit BPK secara kolektif tidak mempunyai dampak yang besar terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan kemampuan model regresi (*Adjusted R Square*) yang sangat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah: Disarankan agar jajaran pemerintah daerah tidak sekadar berfokus pada pencapaian opini WTP sebagai tujuan akhir formalitas akuntansi. Pemerintah daerah harus mulai mengintegrasikan sistem perencanaan anggaran keuangan secara substansial dengan indikator sasaran program kerja riil agar dapat mendongkrak efisiensi birokrasi dan nilai SAKIP.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat nilai koefisien determinasi dalam model penelitian ini sangat kecil, disarankan untuk para peneliti berikutnya agar memperluas jangkauan penelitian dengan mengeksplorasi variabel-variabel independen potensial lainnya yang diduga kuat memengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti tingkat kemandirian fiskal, proporsi alokasi belanja modal, atau tingkat implementasi sistem *e-government*.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Noviyanti, N., Jurusan Akuntansi, K., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2016). Accounting Analysis Journal PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. In AAJ (Vol. 5, Number 1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Anggraini, L. (2022). PENGARUH OPINI AUDIT, KOMITE AUDIT, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDIT DELAY DENGAN VARIABEL MODERASI. In *Accounting Student Research Journal* (Vol. 1, Number 1).
- Anggraini, L., & Rahayu, S. (n.d.). Halaman |45 PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI).
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. In *INVENTORY : Jurnal Akuntansi* (Vol. 4, Number 2).
- Gita Rhamadhani, N., & Heriyati, D. (2025). The Impact of Company Financial Performance and Audit Fees on the Disclosure of Key Audit Matters (KAM). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 35–49. <https://doi.org/10.9744/jak.27.1.35-49>
- Hati, I. P., & Rosini, I. (2017). Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Kondisi Keuangan terhadap Opini Audit Going Concern. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 2, Number 2).

- Hendriarto, P., Hakim Sangapan, L., Budi Paryanti, A., Haymans Manurung, A., & Manurung, A. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah*. <https://doi.org/10.38035/jgia.v3i2>
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (n.d.). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 6, Number 1).
- Kusuma, P. M. (n.d.). PENGARUH OPINI AUDIT DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. In *51 EQUITY* (Vol. 20, Number 1).
- Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. In *Bongaya Journal for Research in Accounting* (Vol. 1).
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., Setyaningrum, D., Pascasarjana, P., & Akuntansi, I. (2008). *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun*.
- Mustikarini, W. A., & Fitriasisari, D. (n.d.). *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2007*.
- Rosa Utari Uly, F., & Julianto, W. (2022). PENGARUH OPINI AUDIT, AUDIT TENURE, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG. In *Accounting Student Research Journal* (Vol. 1, Number 1). www.idx.co.id,
- Safira Syahrir, R., Suryani Prodi, E. S., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2017). *Journal Accounting and Finance Edisi*, 4(1). <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- Santoso, U., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Palangka Raya, U. (n.d.). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud Yohanes Joni Pambelum*. Retrieved www.transparency.org
- Temuan, P., Penyampaian, W., Keuangan, L., Kecukupan, D., Laporan, P., Terhadap, K., Audit, O., Lkpd, A., Kabupaten, P. /, Sumatera, K., Rahmi, S., Annisa, N., Rachma Sari, K., & Armaini, D. R. (2024). Pengaruh Temuan Audit. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 8(2), 117–126. <https://doi.org/10.25124/jaf.v8i1.7940>
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>